

LKJip

Tahun 2021



**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SERANG**

**Jl. Jendral Sudirman Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri
Telp./Fax (0254)8490987**

2022



KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosulullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Disparpora Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disparpora Kota Serang Tahun 2020.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disparpora Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Disparpora Kota Serang Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Disparpora Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2020, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Disparpora Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Disparpora Kota Serang 2020. Semoga Laporan Kinerja Instansi Disparpora Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Disparpora Kota Serang.

Serang, 17 Februari 2021

Kepala Disparpora Kota Serang

Yoyo Wicahyono, S.Sos., MM

NIP. 19651109 198603 1 007





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Disparpora Kota Serang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Disparpora Kota Serang Perubahan Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Disparpora Kota Serang Perubahan Tahun 2021, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran



tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Serang Tahun 2021 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Perubahan Tahun 2021.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Disparpora Kota Serang Tahun 2021 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Disparpora Kota Serang Tahun 2021 memiliki tujuan:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi Disparpora Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Disparpora Kota Serang kepada Pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Pusat.
2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Disparpora Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada Tahun Anggaran Perubahan 2021.
3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Disparpora Kota Serang yang sesungguhnya.
4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023;



5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disparpora Kota Serang Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Walikota Serang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021
 14. Peraturan Walikota Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021
 15. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
1.5 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14



2.1 Tabel 2.1.....	30
2.2 Tabel 2.2.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Disparpora Kota Serang Tahun 2021	30
3.2 Tabel Pengukuran Kinerja Pemerintah Disparpora Kota Serang Tahun 2021	38
3.3 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Disparpora Kota Serang Tahun 2021	39
3.4 Tabel Perkembangan Olahraga Kota Serang Tahun 2016 - 2021	40
3.5 Tabel Perkembangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Serang Tahun 2016 – 2021	40
3.6 Tabel Perkembangan Urusan Pariwisata Kota Serang Tahun 2016-2021.....	41
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021	
BAB V PENUTUP	

1.5 GAMBARAN PELAYANAN UMUM DISPARPORA

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pasal 52 menyebutkan bahwa : DISPARPORA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepemudaan, olahraga serta urusan pilihan pariwisata, membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

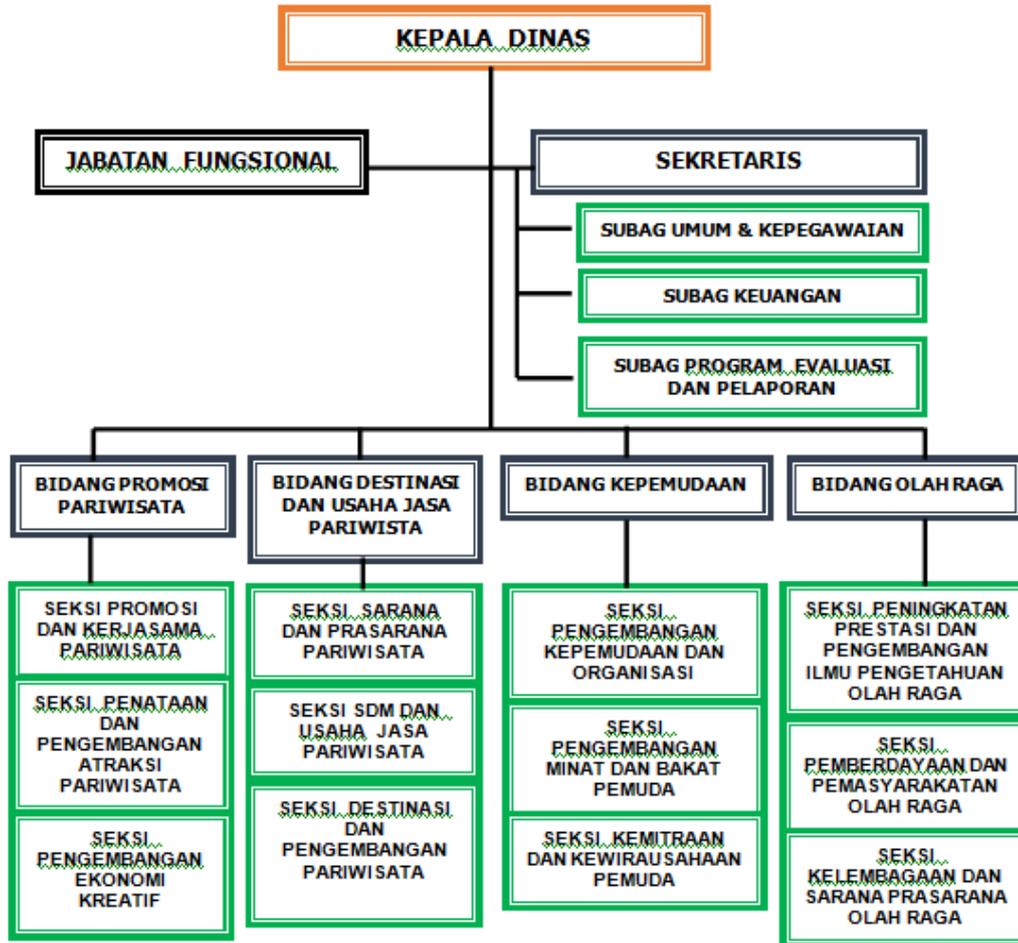
2 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga diatur

Berdasarkan Pasal 52 Perwal No. 12 Tahun 2017, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Promosi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- d. Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
 3. Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 2. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Olahraga;
 3. Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional.



3 SUMBER DAYA APARATUR

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) Perkembangan jumlah aparatur, dan (3) Tingkat kreativitas aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang didukung oleh pegawai saat ini yang tercatat sebanyak 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kepala Dinas	:	1	Orang
2.	Sekretaris	:	1	Orang



3. Kepala Bidang	:	4	Orang
4. Kepala Sub Bagian	:	3	Orang
5. Kepala Seksi	:	12	Orang
7. Pelaksana	:	3	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

1. Tingkat Pendidikan

Ø Strata Dua (S2)	:	22	Orang
Ø Strata Satu (S1)	:	2	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

4 ISU STRATEGIS KOTA SERANG

Dalam penentuan isu strategis ini DISPARPORA Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DISPARPORA Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-dua tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Permasalahan pokok : Kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan dan olah raga. Dan pada isu strategis ke-tiga tentang Pengembangan Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, pada Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)



Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diidentifikasi isu strategis urusan Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, yaitu; isu strategis berdasarkan beberapa aspek seperti;

1. **Aspek kajian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kota Serang**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga yang belum tersedia dan belum didukung oleh indikator kinerja utama, indikator kinerja mandiri, indikator kinerja kunci, SPM, maupun lampiran Permendagri 86 tahun 2017. Sehingga berpotensi menghambat pada pencapaian misi-1 yaitu : “MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN” dan misi-3 yaitu : “MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING” serta berpotensi terjadinya tumpang tindih antar urusan.
2. **Aspek kajian renstra kementerian dan Propinsi Banten**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu perbedaan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan antara Kementerian, Provinsi, dan Kota, menyebabkan adanya perbedaan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun substansi keterpaduan akan tercapai jika Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga menerapkan indikator kinerja yang regulatif.
3. **Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu belum adanya keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban ruang, khususnya terkait dengan pola ruang pemanfaatan dan budidaya, hal ini antara lain disebabkan mekanisme pasar yang dinamis dan lemahnya pengendalian dan penertiban perda RTRW.
4. **Aspek Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu mitigasi KRP sulit dilakukan,



sebab Kebijakan, Rencana dan Program tidak merepresentasikan indikator kinerja dan sasaran yang jelas, hal ini disebabkan nama program, kegiatan terbatas hanya yang tertera dalam permendagri No.13 tahun 2006, sehingga tidak merepresentasikan indikator kinerja (daya dukung dan daya tampung).

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga dimasa datang. Identifikasi isu strategis pada pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penataan Manajemen Keolahragaan
2. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
3. Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
4. Pengembangan Olah raga Berprestasi
5. Peningkatan Promosi Pariwisata
6. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata
7. Peningkatan Layanan Kepemudaan
8. Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Olah Raga
9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata
10. Penanganan dan Pengendalian Bahaya Narkotika

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelayanan Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan pemuda, Olah raga dan Pariwisata maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Isu Strategis DISPARPORA**

NO	ISU STRATEGIS
1	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
2	Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
3	Pembinaan Olah raga Berprestasi
4	Promosi Pariwisata
5	Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata

Aspek Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Pendayagunaan Pemuda mandiri dan Pemuda pelopor
		Pembinaan organisasi dan komunitas Kepemudaan
		Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda
2	Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga	Olah raga rekreasi dan massal
		Pemberdayaan Komunitas olah raga dengan kegiatan yang berkelanjutan
		Sarana Prasarana Olah raga yang dibutuhkan masyarakat
3	Pembinaan Olah raga Berprestasi	Prestasi Olah raga dengan Pembinaan cabang olah raga
		Penerapan teknologi olahraga
		Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
4	Promosi Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi



		Kerjasama pariwisata
		Penataan dan Pengembangan atraksi Pariwisata
5	Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Penataan kawasan wisata
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
		Dukungan sarana dan prasarana penunjang Destinasi

Adapun penjelasan isu strategis adalah :

- a. Membina dan mengembangkan kepemudaan melalui pemahaman terhadap problematika Pemuda, menggali dan inventarisasi potensi pemuda, Internalisasi Belajar dan Spesialisasi pemuda, proses sosialisasi pemuda dan peranan mahasiswa dalam masyarakat untuk membentuk tata nilai pemuda yang sesuai nilai-nilai kebangsaan dan dapat berkontribusi dalam prestasi di kota serang.
- b. Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga untuk meningkatkan ketahanan fisik masyarakat melalui olah raga rekreasi dan event olah raga massal serta meningkatkan prestasi komunitas olah raga di kota serang, termasuk peningkatan ekonomi melalui industri olah raga, di antaranya peralatan dan perlengkapan serta konstruksi fasilitas olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olah raga di kota serang perlu ada kegiatan yang berkelanjutan dalam pemasyarakatan olah raga dan pemberdayaan komunitas olah raga.
- c. Pembinaan olahraga prestasi perlu didukung peningkatan sarana prasarana olahraga dan sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan olahraga prestasi diletakkan di atas landasan pendidikan jasmani dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembinaan



dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan berikut ; **Pertama**, introduksi dan penerapan teknologi olahraga untuk mendorong efisiensi pembinaan olahraga prestasi dengan riset dan pengembangan dalam bidang keolahragaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga riset swasta dan milik pemerintah. **Kedua**, pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Konsep dasarnya ialah bagaimana mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara serasi yang didukung oleh logistik.

- d. Promosi Pariwisata di kota Serang hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Hal penting yang perlu dikembangkan dalam promosi pariwisata di kota Serang; **Pertama** adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. **Kedua** dana promosi dan SDM dari manajemen pengelola pariwisata. **Ketiga** adalah Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. Termasuk didalamnya peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. **Keempat**, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.
- e. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata merupakan pengaturan alokasi ruang agar dapat menjamin sustainable development untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkaitan erat dengan pengembangan destinasi dan objek wisata dimana diperlukan strategi dengan langkah berikut; **Pertama** adalah Penataan kawasan wisata perlu mengikuti kaedah teknis penataan ruang dan terpadu. **Kedua** adalah pengembangan kegiatan pariwisata perlu difokuskan tidak hanya pada aspek fisik tapi juga pengembangan aspek non-fisik, seperti



potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. **Ketiga** adalah pengelolaan konflik antar sektor yang masih terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata, dimana pengembangan kawasan wisata mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian. **Keempat**, perlu adanya pembagian manfaat antara investor dan masyarakat sekitar, agar ada rasa ikut memiliki, seperti pokdarwis. **Kelima** adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. **Keenam**, Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah yang mendukung pengembangan destinasi dan objek wisata. **Ketujuh** adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata untuk menunjang kegiatan pariwisata daerah. **Kedelapan**, perlunya kesiapan masyarakat dengan mendukung terciptanya sapta pesona. **Kesembilan**, meningkatkan investasi pariwisata.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RPJMD Disparpora Kota Serang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

3.2.1 VISI

TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang



- dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
 5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
 6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
 7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

KOTA BERDAYA bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang

KOTA BERBUDAYA merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat



istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa



Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Aje Kendor Membangun Serang”

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari :

Kota Serang yang Partisipatif adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

Kota Serang yang Edukatif dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan



menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang Religius dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang Akuntabel adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang berDaya saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.



Kota Serang yang berBudaya adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang Aman dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang Nyaman adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota Serang, yaitu :

POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor



perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

POTENSI PERTANIAN masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kota. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor



agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan maritim (perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kota Serang.

POTENSI BUDAYA merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat Kota Serang sehingga



dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilai-nilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsnya berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu ditransformasikan pada aktivitas ekonomi kreatif di sektor pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata religi berskala nasional merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni budaya, dan religi yang telah mulai tumbuh saat ini.

3.2.2 MISI

1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;
2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;



Oleh karenanya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”** :

Serta pada MISI KESATU (1) yaitu **MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN**;

Dan MISI KETIGA (3) yaitu **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING**;

Selanjutnya Disparpora Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Disparpora Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pengembangan Pariwisata, Pembinaan Kepemudaan dan Olah raga, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih.

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN DAN RENSTRA DINAS PROVINSI BANTEN

3.3.1 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN PARIWISATA DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI BANTEN



Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pariwisata, yaitu :

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

VISI “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

“MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”

Adapun Misi Kementrian Pariwisata adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;



3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam peningkatan pariwisata melalui promosi dan pengembangan destinasi serta objek unggulan. Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian Pariwisata dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

VISI " MEWUJUDKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BANTEN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN

Dengan demikian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan



visi dan misi nasional, visi dan misi Provinsi Banten, visi dan misi pengembangan kepariwisataan nasional, visi dan misi ekonomi kreatif serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi. Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi daerah serta dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2022, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian; (2) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi; dan (3) Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya

Misi ke-2 :

Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing

Ditujukan untuk : (1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; dan (2) Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

Misi ke-3 :

Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang profesional

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan; (2) Meningkatkan penguatan kelembagaan; dan (3) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Misi ke-4 :

Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Ditujukan untuk : Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Misi ke-5 :



Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (2) Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas; (3) Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi; dan (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat. Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pilihan Pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor Penghambat Pelayanan Pariwisata :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan pengembangan pariwisata
2. Masih kurangnya pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing
3. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata

Faktor Pendorong Pelayanan Pariwisata :

1. Dukungan regulasi dalam pengembangan Pariwisata Daerah
2. Dukungan masyarakat pariwisata dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata
3. Dukungan struktural terhadap peningkatan jumlah wisatawan

3.3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI BANTEN

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan



kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yaitu :

VISI : “MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERDAYA SAING”

Adapun Misi Kementrian pemuda dan Olah raga adalah :

"MENINGKATKAN DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN"

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pemuda dan pengembangan olah raga.

Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah raga Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementrian pemuda dan Olah raga dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

VISI ”PEMUDA MAJU MANDIRI DAN MEMBUDAYAKAN OLAHRAGA YANG BERPRESTASI”

Adapun Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DISPORA PROVINSI BANTEN;
2. MEWUJUDKAN PEMUDA YANG BERKARAKTER PRODUKTIF, BERORIENTASI MAJU MANDIRI DAN BERDAYA SAING;
3. TERCAPAINYA PEMBINAAN OLAHRAGA BERPRESTASI SERTA MEMBUDAYAKAN DAN MEMASYARAKATKAN OLAHRAGA;



Dengan demikian Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemuda dan Olahraga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor faktor Penghambat Pelayanan Pemuda dan Olahraga :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan kepemudaan dan Olahraga
2. Belum efektifnya Pembinaan Olahraga Berprestasi serta membudayakan dan memasyarakatkan Olahraga
3. Masih kurangnya kesadaran pemuda terhadap perannya dalam pembangunan sebagai Pemuda mandiri ataupun Pemuda pelopor dalam meningkatkan daya saing pemuda

Faktor faktor Pendorong Pelayanan Pemuda dan Olahraga :

1. Dukungan regulasi dalam Pembinaan Kepemudaan
2. Dukungan Fasilitasi kepemudaan dan Sarana prasarana pelatihan pada cabang olahraga
3. Dukungan struktural terhadap capaian Prestasi Nasional pada Pemuda dan Cabang Olahraga

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif sebagai masukan, proses, keluaran, hasil dan /atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.



Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut Sajian Indikator Kinerja Utama:

TABEL 2.1

INDIAKTOR KINERJA UTAMA(IKU) DISPARPORA KOTA SERANG

Indikator Kinerja	Target
Indeks Pembangunan Kepemudaan	82%
Persentase pemuda yang mandiri	72%
Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	72%
Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	100%
Capaian peningkatan Kunjungan wisatawan	100%
Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	87



TABEL 2.2

IKU PROGRAM DAN KEGIATAN DISPARPORA KOTA SERANG

Program/Kegiatan	Indikator Keluaran/Hasil Kegiatan	Volume Rencana	
		Jumlah	Satuan
Proram Promosi Pariwisata	Capaian Kerjasama Pariwisata	100	%
	Capaian Pengembangan Atraksi Pariwisata	100	%
	Capaian Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata	100	%
Peningkatan Kerjasama Dan Promosi Pariwisata	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata (Kgt)	1	Kegiatan
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Di Dalam Dan Di Luar Negeri (Kgt)	3	Event
Pengembangan Atraksi Pariwisata	Pengembangan Atraksi Pariwisata (Kgt)	2	Kegiatan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata (Kgt)	4	Kegiatan
Program Destinasi Pariwisata & Bina Usaha	Capaian Pengembangan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) (%)	34	%
	Capaian Destinasi/Objek Pariwisata Kategori Baik Menurut Sapta Pesona Wisata (%)	34	%
	Capaian Pengembangan Destinasi/Objek Baru Pariwisata (%)	100	%
	Capaian Pembinaan Dan Fasilitasi Usaha Jasa Wisata (%)	34	%
	Capaian Pembinaan Sumber Daya Pariwisata (%)	34	%
	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan Tentang Kuliner	80	%
	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Dalam Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan Tentang Home Stay	80	%
	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan Mengenai Wisata Warisan Budaya	80	%
	Tersedianya Sarana Pendukung Promosi Kepariwisataaan	80	%



Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Terwujudnya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (Kgt)	1	Kegiatan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Terlaksananya Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Desa)	1	Kel
Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	1	Pkt
	Pemeliharaan Sarana Dan Sarana Pariwisata	1	Sarpras
	Dokumen DED	0	Dokumen
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Pariwisata (Kgt)	40	Orang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK NON FISIK)	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kepariwisata (Manajemen Home Stay, Wisata Warisan Budaya Dan Kuliner)	130	Orang
Program Kepemudaan	Capaian Okp Mandiri (%)	0	%
	Capaian Prestasi Propinsi Pemuda Pelopor (%)	0	%
	Persentase Pemuda Yang Terbina (%)	0	%
	Capaian Wirausaha Muda (%)	0	%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	25	Org
	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	0	Org
	Peringatan Hari Besar Nasional	2	Event
Pembinaan Minat Bakat Pemuda	Pendataan Potensi Kepemudaan	0	Dok
	Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kepemudaan	0	Dok
	Lomba Kreasi Dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	0	Event
	Pembinaan Pemuda Pelopor Pembangunan	0	Orang
	Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan	0	Orang
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0	Orang
	Pengembangan Data Kewirausahaan Pemuda	0	Kgt
	Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat	0	Dok
Program Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Atet Muda	30	%



	Capaian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pelajar Daerah	60	%
	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	40	%
	Capaian Pembinaan Organisasi Olahraga	20	%
	Capaian Pemasarakatan Olah Raga	25	%
	Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Olah Raga	50	%
Pembinaan Atlet Dan Pelatih	Pelaksanaan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah	1	Kegiatan
	Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Industri Olahraga	1	Kgt
Penyelenggaraan Event Olahraga	Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga	0	Dok
	Pembinaan Keolahragaan Daerah	2	Event
Pemberdayaan Dan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Rekreasi	5	Cabor
	Pengembangan Dan Pemberdayaan Olahraga Di Masyarakat	1	Kgt
	Standarisasi Manajemen Keolahragaan Daerah	0	Kgt
Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	8	Sarpras
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga	0	Kgt
	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Olah Raga	0	Kgt
	Dokumen DED	7	Dokumen
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga	7	Unit

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam



mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Disparpora Kota Serang Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Disparpora Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Serang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Serang yang berada pada OPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota Serang, dengan total Belanja Langsung sebesar Rp. 11.364.152.700,- . Rincian Anggaran Belanja Langsung terlampir pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Disparpora Kota Serang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Disparpora Kota Serang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Disparpora Kota Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Serang dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Disparpora Kota Serang perlu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Disparpora Kota Serang tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



TABEL 3.1

PENCAPAIAN REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG TAHUN 2021

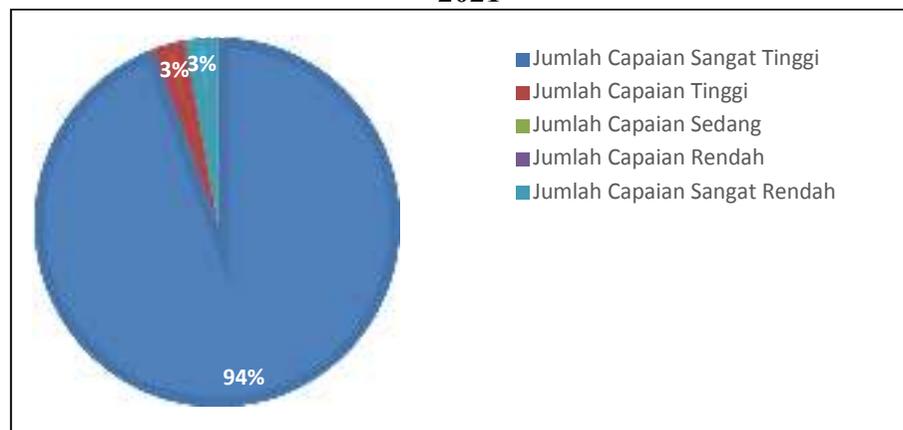
No.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET		
			KEGIATAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga		Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%	50	50	100			
2											
3					Indeks Pembangunan Kepemudaan	%	85	85	100		
4					Persentase pemuda yang mandiri	%	100	100	100		
5					Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	%	73	73	100		
6					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang	%	70	70	100	
7					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Posentase Pemuda Yang Dibina	%	100	100	100	
8					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Pemuda terbina	%	60	60	100	
9					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian pembinaan klub olahraga	%	55	55	100	
10					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan sarana prasarana olah raga	%	35	35	100	
11					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Olahraga Yang Dibina	%	100	100	100	
12					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase Keikutsertaan Peserta Senam dan Olahraga Rekreasi Terhadap Target	%	100	100	100	
13	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya destinasi dan promosi wisata		Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	100	100			
14				Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%	100	100	100			
15				Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp	150.000.000	150.000.000	100			



16		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB)	%	35	35	100	
17		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%	100	100	100	
18		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	
19		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata	%	100	100	100	
20		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate/Kota	%	100	100	100	
21		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Baru Ekraf	Usaha	50	40	80	
22		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Sumber Daya Pariwisata Yang Dibina Terhadap Jumlah Pelaku Pariwisata Kota Serang	%	50	50	100	
23		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase Wirausaha Ekraf yang dibina terhadap Total Wirausaha Kota Serang	%	100	8,33	8,33	
24			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	(skala 0 - 100)	57	57	100	
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100	100	100	
26		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	
27		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	100	100	100	
28		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen BMD	%	100	100	100	
29		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	25	25	100	
30		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Urusan Rutin Perangkat Dearah	%	100	100	100	
31		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	%	100	100	100	



DIAGRAM 3.1
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SERANG TAHUN 2021



Sumber : Disparpora Kota Serang, Tahun 2021 (diolah)

TABEL 3.2
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SERANG TAHUN 2018-2021

No.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		2019		2020		2021	
						KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6								
1	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olahraga			Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%	25	3.868.939.000	30	12.093.288.000	40	10.333.511.237	50	12.578.238.431
2		Meningkatnya pembinaan		Indeks Pembangunan Kepemudaan	%	70	3.868.939.000	80	12.093.288.000	82	10.333.511.237	85	12.578.238.431



3	organisasi pemuda dan cabang olah raga		Persentase pemuda yang mandiri	%	60		70		72		100	
			Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	%	60		70		72		73	
4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang	%	60	2.050.347.000	65	1.814.968.000	65	152.410.000	70	12.578.238.431
5		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Posentase Pemuda Yang Dibina	%	2	2.002.317.000	2	1.736.968.000	0	152.410.000	100	1.177.560.536
6		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Pemuda terbina	%	60	48.030.000	60	78.000.000	0	-	60	289.527.000
7		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian pembinaan klub olahraga	%	53	1.818.592.000	54	10.278.320.000	54	10.181.101.237	55	11.400.677.895
8		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan sarana prasarana olahraga	%	30	1.106.770.000	30	1.678.420.000	30	6.702.291.237	35	7.859.207.895
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terselenggara nya Event Olahraga	%	100	497.240.000	100	600.000.000	100	411.750.000	100	-



9			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Organisasi Olahraga Yang Dibina	%	4	-	10	7.800.000.000		2.800.000.000	100	3.370.470.000	
10			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase Keikutsertaan Peserta Senam dan Olahraga Rekreasi Terhadap Target	%	NA	214.582.000	NA	199.900.000	NA	267.060.000	100	171.000.000	
	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah			Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	NA	1.650.430.000	100		100		100	1.237.479.250	
11			Meningkatnya destinasi dan promosi wisata	Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%	7	-	100		100		100	1.237.479.250	
12				Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp	NA	-	NA		NA		NA		
13				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB)	%	33	213.000.000	33	954.160.000	100	739.792.000	35	732.619.250
14				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%	NA	-	NA	373.650.000	NA	346.775.000	100	224.214.500
				Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota (KKB)	Objek	NA	-	NA	-	NA	-	-	-



15			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	%	NA	213.000.000	NA	580.510.000	NA	393.017.000	100	508.404.750
16			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata	%	100	1.437.430.000	100	434.215.000	100	244.155.000	100	322.767.000
17			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Srategis Pariwisata Kabupate/Kota	%	NA	1.437.430.000	NA	434.215.000	100	244.155.000	100	322.767.000
18			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Baru Ekraf	Usaha	50	-	50	917.674.200	50	457.145.500	50	182.093.000
19			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Sumber Daya Pariwisata Yang Dibina Terhadap Jumlah Pelaku Pariwsata Kota Serang	%	NA	-	NA	780.720.000	NA	226.315.000	50	95.261.000
20			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase Wirausaha Ekraf yang dibina terhadap Total Wirausaha Kota Serang	%	NA	-	NA	136.954.200	NA	230.830.500	100	86.832.000
21		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	(skala 0 - 100)	NA	1.414.093.405	55	5.646.701.943	56	5.497.543.558	57	6.121.451.122



		Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah		Pada Lingkup Perangkat Daerah									
22			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	70	1.414.093.405	70	5.646.701.943	75	5.497.543.558	100	6.121.451.122
23			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	218.488.000	100	299.310.500	100	164.641.500	100	374.870.500
24			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	100	10.662.000	100	3.630.690.273	100	3.908.872.740	100	4.237.248.703
25			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen BMD	%	NA	46.780.000	NA	43.281.070	NA	17.200.000	100	48.372.000
26			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	NA	370.185.905	NA	376.078.385	NA	643.733.000	25	432.842.703
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	NA	55.640.000	NA	-	NA	2.500.000	0	-
27			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Urusan Rutin Perangkat Daerah	%	NA	322.800.000	NA	600.000.000	NA	487.082.918	100	566.300.000
28			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	%	100	389.537.500	100	697.341.715	100	290.713.400	100	461.817.216



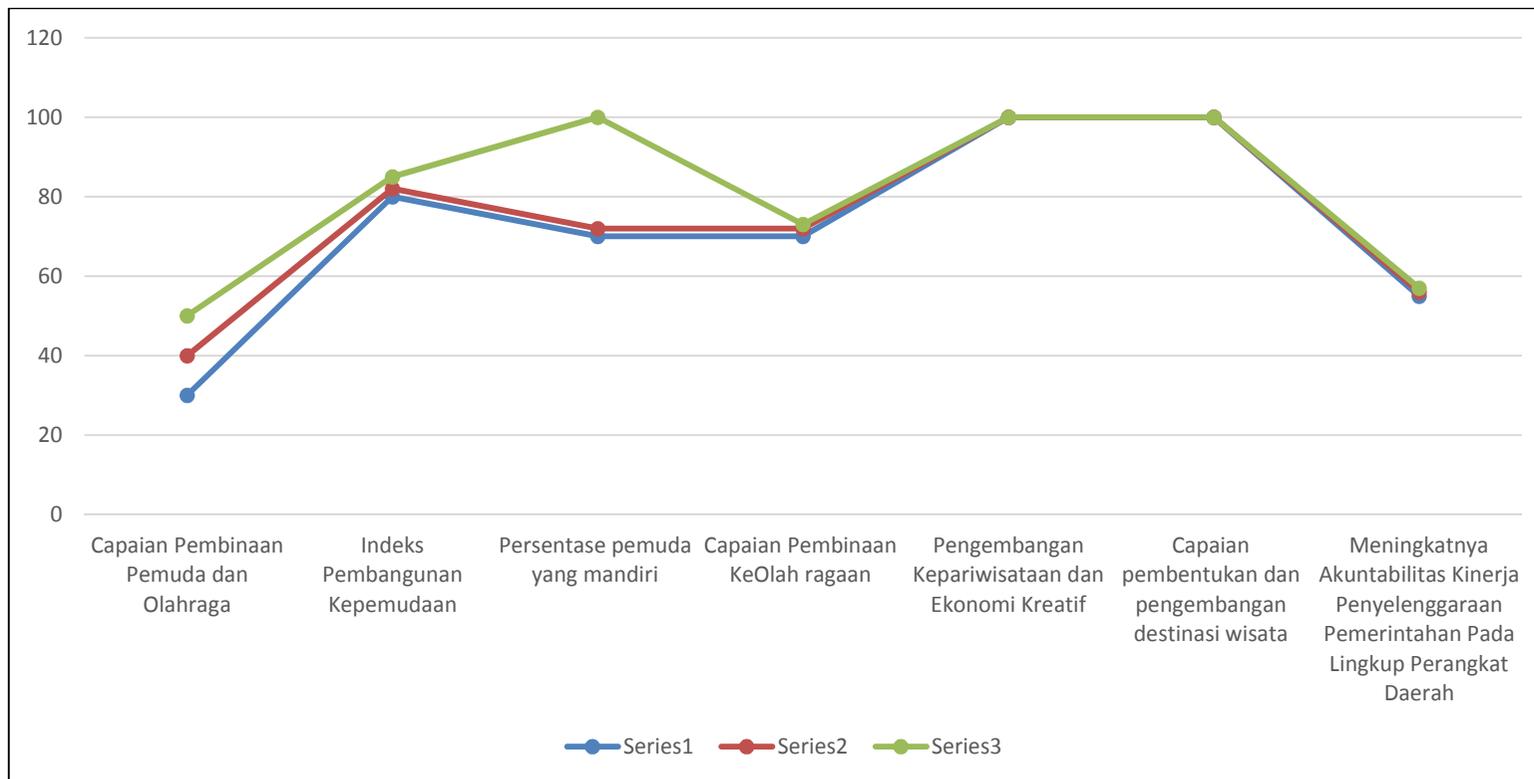
TABEL 3.3
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
DISPARPORA KOTA SERANG TAHUN 2018-2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA				TARGET KINERJA				PROSENTASE CAPAIAN			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10/6*100	15=11/6*100	16=12/8*100	17=13/8*100
1	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olahraga		Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%	25	30	40	50	25	30	40	50	100	100	100	100
2		Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	%	70	80	82	85	70	80	82	85	100	100	100	100
3			Persentase pemuda yang mandiri	%	60	70	72	100	60	70	72	100	100	100	100	100
				Capaian Pembinaan KeOlahraga	%	60	70	72	73	60	70	72	73	100	100	100
	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah		Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	NA	100	100	100	NA	100	100	100	-	100	100	100
11			Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%	7	100	100	100	7	100	100	100	100	100	100	100
12		Meningkatnya destinasi dan promosi wisata	Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp	-	-	-	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	-	100
21		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	(skala 0 - 100)	NA	55	56	57	NA	55	56	57	-	100	100	100



an Pada
Lingkup
Perangkat
Daerah

GRAFIK 3.3
PENCAPAIAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
DISPARPORA KOTA SERANG TAHUN 2018-2021





TABEL 3.4
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DISPARPORA KOTA SERANG TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Ket.
			Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.467.087.536	1.428.569.536	97,37	
2			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.177.560.536	1.165.202.536	98,95	
3			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	289.527.000	263.367.000	90,96	
4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.400.677.895	10.673.275.973	93,62	
5			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.859.207.895	7.219.470.500	91,86	
6			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.370.470.000	3.282.805.473	97,40	
7			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	171.000.000	171.000.000	100	
10	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya destinasi dan promosi wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	732.619.250	450.700.000	61,52	
11			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	224.214.500	204.006.000	90,99	
12			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	508.404.750	246.694.000	48,52	
13			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	322.767.000	306.228.000	94,88	
14			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	322.767.000	306.228.000	94,88	
15			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	182.093.000	170.943.000	93,88	
16			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	95.261.000	93.711.000	98,37	
17	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.832.000	77.232.000	88,94			
19	Meningkatnya Kualitas Kesekretariatan Dengan Mengarahkan Aparatur Pada Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kesekretariatan Dengan Mengarahkan Aparatur Pada Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.121.451.122	5.769.438.165	94,25	
20			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.870.500	302.601.522	80,72	
21			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.237.248.703	4.114.055.401	97,09	
22			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.372.000	48.362.000	99,98	
23			Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.842.703	408.439.179	94,36	
24			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.300.000	437.167.063	77,20	
25			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.817.216	458.813.000	99,35	



TABEL 3.5
PENCAPAIAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
DISPARPORA KOTA SERANG TAHUN 2018-2021

No.	Tipe	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Tercapai / direncanakan (Rp.)				Tercapai / direncanakan (%)				Tercapai / direncanakan (Rp.)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Strategis	peningkatan pendapatan daerah (kegiatan objek pajak)	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah	10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100
2		Peningkatan pendapatan daerah (kegiatan objek pajak)	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah	10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100
3	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah		10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100	
4	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah		10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100	
5	Strategis	peningkatan pendapatan daerah (kegiatan objek pajak)	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah	10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100
6		Peningkatan pendapatan daerah (kegiatan objek pajak)	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah	10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100
7	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah		10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100	
8	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah		10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100	
9	Strategis	peningkatan pendapatan daerah (kegiatan objek pajak)	Relevansi Pendapatan Pajak Daerah	10	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	1.460.000.000	1.420.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100	100	100



BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disparpora Kota Serang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Disparpora Kota Serang Tahun 2021. Berdasarkan hasil Reviu LkjIP Tahun 2021 Disparpora Kota Serang mendapat nilai 66,47 dengan (B/Baik). Adapun Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Tahun 2021 yaitu:

- a. Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, LKjIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga agar dipublikasikan melalui website pemerintah agar mudah di akses oleh masyarakat.
- b. Penyusunan Anggaran agar memperhatikan dan memanfaatkan rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
- c. Monitoring Renstra harus dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Penetapan target kinerja harus berdaarkan data dan perhitungan yang logis.
- e. Menyusun mekanisme pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi.
- f. Capaian IKU harus dijadikan dasar promosi/kenaikan pangkat pegawai.
- g. Capaian Kinerja harus digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.
- h. Laporan Kinerja disarankan untuk menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik.
- i. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Jawaban hasil Reviu yakni sebagai berikut:



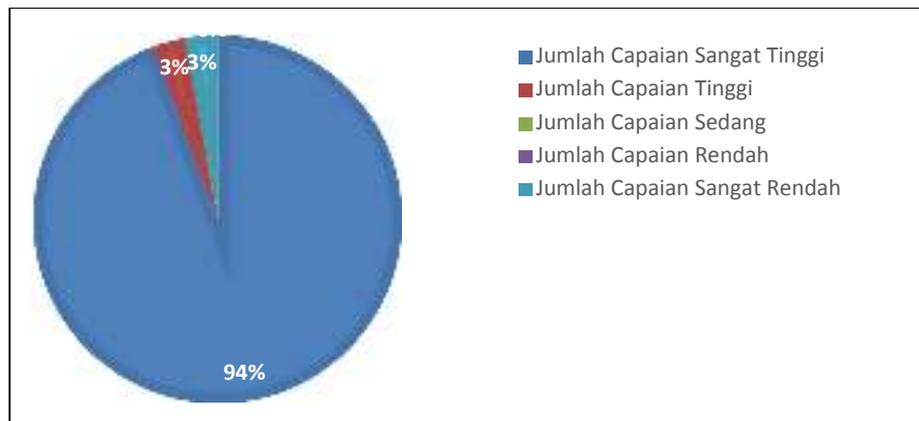
- a. Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, LKjIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga akan dipublikasikan melalui website pemerintah agar mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Penyusunan Anggaran akan memperhatikan dan memanfaatkan rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
- c. Monitoring Renstra sudah dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) namun perlu disempurnakan dalam eksekusinya.
- d. Penetapan target kinerja sudah berdasarkan data dan perhitungan yang logis namun harus dikonfirmasi ulang dengan tiap bidang.
- e. Akan menyusun mekanisme pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi.
- f. Capaian IKU akan dijadikan dasar promosi/kenaikan pangkat pegawai, dan segera dikomunikasikan ke Bagian Umum dan Kepegaiwaan, dikarenakan sampai saat ini PEP maupun belum ada konfirmasi dari BKPSDM terkait hal tersebut
- g. Capaian Kinerja akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, namun perlu dikomunikasikan ke Bagian Umum dan Kepegaiwaan, dikarenakan sampai saat ini PEP maupun belum ada konfirmasi dari BKPSDM terkait hal tersebut
- h. Laporan Kinerja akan diusahakan untuk menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik.



BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disparpora Kota Serang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Disparpora Kota Serang Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Disparpora Kota Serang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Disparpora Kota Serang dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Kesimpulan Capaian Kinerja Disparpora dapat dilihat pada Diagram berikut:



Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Perubahan Tahun 2021, Target Belanja Disparpora Kota Serang sebesar Rp. 20.135.222.611,- dengan Realisasi sebesar Rp. 18.799.154.674,- atau terserap sebesar 93,36%. Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang



tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk Tahun 2021 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Disparpora Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Disparpora Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang.

Serang, 17 Februari 2021

Kepala Disparpora Kota Serang

Yoyo Wicahyono, S.Sos., MM
NIP. 19651109 198603 1 007